

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium di Universitas Andalas (UNAND) mencuat ke ruang publik dan menjadi perhatian luas setelah diberitakan secara intensif oleh berbagai media pada awal September 2025. Kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan alat laboratorium sental tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp5,87 miliar yang diduga mengandung penyimpangan administratif dan substantif. Berdasarkan pemberitaan Genta Andalas (4 September 2025), proses hukum atas kasus ini telah berlangsung sejak akhir tahun 2022 dan berkembang hingga penetapan 12 tersangka, termasuk mantan Wakil Rektor I UNAND periode 2016 – 2020 serta sejumlah pejabat universitas lainnya.

Krisis institusional semakin kompleks ketika muncul pemberitaan mengenai dugaan intimidasi dan diskriminasi terhadap pers mahasiswa yang memberitakan kasus tersebut. Beberapa media nasional, seperti Kompas, Tempo, Media Indonesia, dan MSN, mengangkat pernyataan pimpinan UKPM Genta Andalas yang menyebut adanya permintaan dari pejabat kampus untuk menarik atau menghapus berita terkait dugaan korupsi. Penolakan terhadap permintaan tersebut dikabarkan diikuti dengan ancaman pemanggilan oleh pihak universitas, sehingga memunculkan isu pembatasan kebebasan pers di lingkungan akademik.

Menanggapi pemberitaan tersebut, UNAND melalui Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik menyampaikan klarifikasi resmi sebagaimana dimuat

dalam Press Release Nomor: B/03/UN16.17/HM.01.03/2025 tertanggal 5 September 2025 di laman resmi UNAND. Dalam pernyataan tersebut, pihak universitas membantah tuduhan diskriminasi terhadap pers mahasiswa, menegaskan komitmen terhadap nilai demokrasi dan kebebasan pers, serta menyatakan bahwa penanganan dugaan korupsi sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa kasus dugaan korupsi di UNAND tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berkembang menjadi krisis reputasi dan komunikasi ketika terjadi ketegangan antara narasi institusi dengan narasi publik.

Hal ini tercermin dalam diskursus media sosial—meskipun tidak dimaksudkan sebagai representasi statistik opini publik—khususnya pada kolom komentar unggahan sejumlah akun media di Instagram seperti Langgam.id, Padang_TV, dan Babesumber yang memuat pemberitaan terkait kasus ini, dalam kolom komentar tersebut, banyak warganet mengekspresikan kekecewaan dan keprihatinan terhadap UNAND, serta menyayangkan keterlibatan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Sumatera Barat dalam dugaan praktik korupsi. Reaksi ini menunjukkan adanya penilaian negatif publik yang mulai melekat pada institusi, bukan semata pada individu yang terlibat.

Selanjutnya hal ini juga tampak dari respons kalangan internal kampus, khususnya mahasiswa. Pada kolom komentar unggahan akun BEM KM UNAND yang menyinggung isu dugaan korupsi ini, terlihat adanya sikap skeptis dan sinisme dari mahasiswa. Beberapa komentar menunjukkan kesan bahwa mahasiswa “sudah tidak heran” terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat kampus, sementara sebagian lainnya secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pengungkapan

kasus tersebut hingga tuntas. Sikap ini mencerminkan melemahnya kepercayaan mahasiswa terhadap integritas institusi serta adanya jarak antara nilai ideal perguruan tinggi dan praktik yang dipersepsikan terjadi.

Diskursus di media sosial ini sejalan dengan Alatas & Cameron (2021) yang menjelaskan bahwa tindakan koruptif melemahkan keyakinan masyarakat terhadap pejabat publik maupun lembaga yang menaunginya, sehingga memicu ketidakpuasan serta menjauhkan masyarakat dari partisipasi dan interaksi dengan institusi yang terlibat. Penelitian Dzordzormenyoh (2024), menunjukkan bahwa korupsi membentuk persepsi ketidakadilan dan pengkhianatan di kalangan masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya menggerus citra institusi dan berkontribusi pada merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bersangkutan.

Krisis organisasi merupakan peristiwa yang berdampak luas, tidak hanya terhadap manajemen organisasi, tetapi juga karyawan, para pemangku kepentingan, serta masyarakat di mana organisasi beroperasi. Millar & Heath (2004) dalam Marsen (2020) mendefinisikan krisis sebagai kejadian yang muncul pada waktu yang tidak diharapkan, namun sebenarnya masih dapat diprediksi, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap kepentingan *stakeholder* dan reputasi organisasi yang mengalaminya. Dengan demikian suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai krisis ketika mengancam reputasi dan legitimasi organisasi di mata publik.

Faktor penentu utama lainnya dalam suatu krisis adalah tingkat keparahannya, sehingga ketika krisis mencapai tingkat tertentu, situasi tersebut menuntut adanya respons dari organisasi (Anderson-Meli & Koshy, 2020). Respon

institusi dalam menghadapi krisis kerap menjadi faktor kunci dalam manajemen krisis dan memulihkan citra serta kepercayaan publik, sehingga pengelolaan komunikasi krisis yang efektif memegang peranan krusial. Dalam kasus korupsi pengadaan alat laboratorium sentral UNAND ini, diperlukan komunikasi internal dan eksternal bagi seluruh pihak terkait sebagai upaya manajemen krisis untuk kemudian membentuk respon yang sesuai dengan krisis yang ada. Menurut Uddin et al. (2013) dalam situasi krisis, proses komunikasi dalam organisasi cenderung mengalami perubahan signifikan. Idealnya, komunikasi menjadi lebih tersentralisasi, di mana aktor kunci atau pimpinan organisasi tampil lebih dominan sebagai sumber utama informasi dan pengambil keputusan. Pada saat yang sama, komunikasi timbal balik antaranggota organisasi meningkat guna memperlancar koordinasi dan memastikan pertukaran informasi penting dapat berlangsung cepat dan efektif.

Struktur jaringan komunikasi juga lebih terarah, dengan berkurangnya keterhubungan antar kelompok kecil yang terlalu rapat, sehingga aliran informasi dapat bergerak lebih efisien dari pusat ke seluruh bagian organisasi. Secara keseluruhan, pola komunikasi ini menunjukkan upaya organisasi untuk memusatkan informasi pada simpul-simpul strategis sekaligus memperkuat solidaritas internal, dengan tujuan menekan ketidakpastian, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespons krisis secara cepat dan tepat.

Proses komunikasi di Universitas Andalas sendiri dijelaskan oleh Aidinil Zetra, Sekretaris Universitas Andalas dalam wawancara awal dengan peneliti, sebagai mekanisme yang terstruktur dan terpusat. Ketika muncul pemberitaan

mengenai UNAND di media massa maupun media daring, biasanya sejumlah rekan media segera mengajukan permintaan konfirmasi ke Universitas melalui Humas. Dalam kasus ini, mengingat tingginya intensitas permintaan klarifikasi, UNAND menerapkan model komunikasi satu pintu melalui Sekretaris Universitas sebagai juru bicara resmi institusi. Model ini bertujuan untuk memastikan konsistensi pesan dan menghindari terjadinya perbedaan informasi di ruang publik. Pada tahap awal ketika isu tersebut mencuat, UNAND terlebih dahulu melakukan verifikasi internal berupa audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan kemudian menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan dukungan institusi terhadap proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus mengingatkan pentingnya menghindari praktik *trial by media* terhadap kasus yang belum memperoleh putusan pengadilan.

Setelah proses verifikasi dan audit dilakukan, UNAND kemudian menyampaikan sikap resmi institusi dalam merespons isu tersebut. UNAND menyampaikan komitmennya terhadap prinsip anti korupsi serta kesiapan untuk melakukan langkah korektif apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam prosedur. Selain itu, UNAND juga menyatakan akan mengambil tindakan administratif terhadap pihak terkait apabila terbukti terjadi pelanggaran. Sikap dan posisi resmi tersebut disampaikan kepada publik melalui *press release* yang dipublikasikan di laman resmi dan media sosial UNAND.

Secara umum, manajemen krisis yang efektif bermula dari pengumpulan fakta yang komprehensif di internal organisasi dan koordinasi antarunit terkait, termasuk dengan pihak manajemen universitas, biro hukum, dan tim teknis yang memahami detail kasus. Tahapan ini penting untuk menghasilkan pesan

komunikasi yang akurat dan kredibel, menghindari kesalahan narasi yang dapat memperburuk krisis. Komunikasi internal yang kuat juga membantu humas menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan organisasi sebelum informasi disampaikan ke publik, sehingga meminimalisir konflik internal dan memastikan konten komunikasi publik tidak menimbulkan inkonsistensi yang merugikan (Calilao et al., 2024).

Langkah koordinasi dan pengelolaan fakta ini dilakukan oleh UNAND dan dituangkan melalui penyampaian informasi publik yang terstruktur, termasuk melalui Press Release yang terbit pada 5 September 2025, dan press conference pada 9 September 2025. Dalam keduanya, Sekretaris Universitas memberikan penjelasan komprehensif mengenai perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium. Di dalamnya memuat klarifikasi yang bertujuan untuk menjawab kekhawatiran publik dan memperbaiki persepsi institusi di mata *stakeholder*.

Studi oleh Jayanto (2025) mengulas strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh Pertamina dalam skandal korupsi dan pengoplosan BBM yang mencuat pada Februari 2025. Studi tersebut menemukan bahwa Pertamina menggunakan kombinasi antara strategi optimal seperti penyampaian permintaan maaf, keterbukaan terhadap hasil pengujian BBM, serta pelibatan para pemangku kepentingan, dan strategi suboptimal yang di antaranya penyangkalan, kecenderungan meremehkan tingkat keparahan krisis, serta keterlambatan dalam merespons. Perpaduan strategi yang tidak konsisten ini justru memperburuk dinamika krisis yang terjadi.

Dalam studi ini, Jayanto (2025) menekankan bahwa keberhasilan komunikasi krisis Pertamina sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk mengintegrasikan dimensi emosional dan moral dalam pesan yang disampaikan. Hal ini disebabkan oleh tantangan ganda yang dihadapi, yaitu kebutuhan untuk memulihkan reputasi organisasi sekaligus merespons tuntutan publik akan keadilan.

Merujuk pada penelitian di atas disimpulkan bahwa perlunya manajemen krisis dalam mengelola opini publik dan reputasi institusi ketika terjadi isu yang mengancam citra dan integritas organisasi. Kasus korupsi di Pertamina menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi strategis dapat memperburuk persepsi publik, yang pada akhirnya berdampak pada legitimasi organisasi di mata masyarakat. Temuan ini relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti karena sama-sama memerlukan pendekatan komunikasi krisis yang terencana dan terukur untuk menghadapi sorotan publik serta memulihkan kepercayaan berbagai pemangku kepentingan.

Proses Manajemen Krisis Universitas Andalas sebelumnya juga pernah diteliti oleh Auliya (2025) dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Krisis Humas Universitas Andalas Dalam Menghadapi Kasus Pelecehan Seksual (Studi Kasus Krisis Akibat Kasus Pelecehan Seksual Dosen dan Mahasiswa)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Humas Universitas Andalas menerapkan strategi komunikasi krisis yang mencakup tahapan pra-krisis, respons krisis, dan pasca-krisis. Pada tahap pra krisis, dilakukan pemantauan isu serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP). Pada tahap respons krisis, Humas menekankan komunikasi yang transparan dan menjalin kerja sama dengan Satuan Tugas

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Selanjutnya, pada tahap pasca krisis, upaya pemulihan reputasi dilakukan melalui pendekatan komunikasi berbasis empati dan penguatan kepercayaan publik. Temuan penelitian Auliya ini sejalan dengan informasi mengenai SOP penanganan krisis yang diperoleh melalui wawancara awal dengan Sekretaris Universitas Andalas, Aidinil Zetra.

Meskipun memiliki kesamaan dalam fokus pada proses manajemen krisis Universitas Andalas, penelitian Auliya (2025) berbeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti dari segi jenis kasus dan subjek penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada krisis yang dipicu oleh kasus pelecehan seksual dengan aktor utama berupa dosen dan mahasiswa, serta melibatkan Satgas PPKS sebagai mitra strategis. Sementara penelitian ini akan mengkaji krisis yang bersumber dari dugaan tindak pidana korupsi yang disertai isu intimidasi terhadap pers mahasiswa, dengan aktor yang terlibat mencakup pimpinan universitas, dan unit pers mahasiswa. Perbedaan konteks krisis dan aktor tersebut membuka ruang kajian baru mengenai bagaimana Universitas Andalas merespons krisis yang menyentuh aspek integritas kelembagaan dan tata kelola institusi, sehingga memperkaya perspektif penelitian mengenai manajemen krisis di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan menganalisis manajemen krisis yang dilakukan oleh Universitas Andalas dalam merespons Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Laboratorium Sentral, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Universitas Andalas mengelola dan mengomunikasikan krisis tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Manajemen Krisis Universitas Andalas dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Laboratorium Sentral”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, peneliti menarik rumusan pada penelitian ini yaitu: “Bagaimana Universitas Andalas memajemen krisis pada kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen krisis yang dilakukan Universitas Andalas dalam isu kasus dugaan korupsi alat laboratorium sentral.
2. Untuk menganalisis strategi manajemen krisis Universitas Andalas dalam merespons isu kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium sentral.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi khususnya dalam bidang manajemen isu dan krisis dalam lingkup Universitas. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana institusi pendidikan dalam menghadapi isu dan krisis.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Data dalam penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan serta bahan pustaka bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi, yang akan melakukan penelitian terkait.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi Ilmu Komunikasi, khususnya yang berada di lingkup pendidikan, untuk

meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan isu dan krisis di wilayah institusinya.

